

# ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 101 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH: STUDI FENOMENOLOGI PADA BMT

Widya Susanty<sup>1</sup>, Shabri Abd Majid<sup>2</sup> Sugianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [widya1100000170@Uinsu.ac.id](mailto:widya1100000170@Uinsu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [mshabri@unsyiah.ac.id](mailto:mshabri@unsyiah.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [sugianto@uinsu.ac.id](mailto:sugianto@uinsu.ac.id)

---

## Abstract

---

**Keywords:**  
PSAK 101; Sharia  
Cooperatives;  
Sharia Financial  
Reports.

---

*This study aims to systematically examine the implementation of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 101 in the preparation of financial reports in Islamic cooperatives, especially Baitul Maal wa Tamwil (BMT). The method used is the Systematic Literature Review (SLR) with the PRISMA 2020 approach. A total of 10 scientific articles published between 2015 and 2025 were analyzed to answer three main research focuses, namely: (1) the level of compliance of Islamic cooperatives with the provisions of PSAK 101, (2) components of financial reports that are not yet in accordance or have not been prepared, and (3) inhibiting and driving factors in the implementation of the standard. The results of the study show that the majority of Islamic cooperatives only prepare balance sheets and profit and loss statements, while other components such as temporary syirkah fund reports, ZIS reports, and trust funds are rarely disclosed. The main obstacles in the implementation of PSAK 101 include low literacy in Islamic accounting, the lack of integration of sharia-based financial information systems, and weak external supervision. However, there are initiatives and internal awareness from cooperative managers to improve the quality of financial reporting.*

---

---

## Abstrak

---

**Kata kunci:**  
PSAK 101;  
Koperasi Syariah;  
Laporan  
Keuangan Syariah.

---

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi syariah, khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA 2020. Sebanyak 10 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025 dianalisis untuk menjawab tiga fokus utama penelitian, yaitu: (1) tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap ketentuan PSAK 101, (2) komponen laporan keuangan yang belum sesuai atau belum disusun, dan (3) faktor penghambat serta pendorong dalam implementasi standar tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas koperasi syariah hanya menyusun neraca dan laporan laba rugi, sementara komponen lain seperti laporan dana syirkah temporer, laporan ZIS, dan dana amanah jarang diungkapkan. Hambatan utama dalam penerapan PSAK 101 meliputi rendahnya literasi akuntansi syariah, belum terintegrasinya sistem informasi keuangan berbasis syariah, serta lemahnya pengawasan eksternal. Meskipun demikian, terdapat inisiatif dan kesadaran internal dari pengelola koperasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.*

---

**Diajukan :** Juni  
2025

**Diterima :** Juli  
2025

**Diterbitkan :** Juli  
2025

Corresponding Author:

Widya Susanty

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; [widya1100000170@Uinsu.ac.id](mailto:widya1100000170@Uinsu.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan tren positif sejak akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk aktualisasi dari praktik ekonomi Islam adalah pendirian koperasi syariah atau *Koperasi Jasa Keuangan Syariah* (KJKS), yang mengemban peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Nurul Aulia Dewi, Alike Hariani, 2023). Koperasi ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan berbasis syariah seperti pembiayaan dan simpanan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan keummatan yang lebih luas.

Dalam menjalankan fungsinya, KJKS dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi aspek penting karena mencerminkan akuntabilitas dan transparansi institusi keuangan, serta menjadi sumber informasi utama bagi para stakeholder, baik internal maupun eksternal (Damayanti, Sugianto, & Atika, 2023). Oleh sebab itu, dalam konteks entitas syariah, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) yang relevan, khususnya PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 101 mengatur secara komprehensif mengenai komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah, termasuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan kebajikan. Tujuan utama PSAK 101 adalah agar laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas keuangan entitas.

Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAK 101 di berbagai KJKS di Indonesia masih menemui banyak kendala. Penelitian ini penyusunan laporan keuangan di tiga koperasi syariah di Medan yaitu BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Musabbihin, dan BMT Mandiri Abadi Syariah belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK 101. Masih ditemukan laporan keuangan yang hanya terbatas pada neraca dan laporan laba rugi, tanpa mencantumkan komponen penting lainnya seperti laporan dana syirkah temporer, laporan penggunaan dana zakat dan kebajikan, maupun catatan atas laporan keuangan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pemahaman pengelola koperasi syariah terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku (Firayani Firayani, Bambang Kurniawan, & Eri Nofriza, 2024). Kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis dari otoritas terkait, seperti Dinas Koperasi atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam akuntansi syariah juga menjadi tantangan tersendiri yang belum terselesaikan secara sistematis.

Temuan Widya Susanty senada dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Saputri, Fitriyah, & Jumaidi, 2019) di BMT "X" (Toyyibi, 2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh banyak BMT belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan PSAK 101. Bahkan, pada beberapa studi ditemukan bahwa informasi penting seperti dana zakat dan kebajikan dimasukkan ke dalam pos neraca biasa, tanpa ada pemisahan dan pengungkapan secara eksplisit sesuai standar. Hal ini tentu mengaburkan esensi syariah dalam pelaporan keuangan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan amanah.

Secara umum, kesenjangan antara ketentuan normatif dalam PSAK 101 dan praktik empiris di lapangan menunjukkan adanya "compliance gap" yang signifikan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota dan publik terhadap koperasi syariah. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperlemah peran strategis koperasi syariah dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi PSAK 101 secara lebih menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap berbagai penelitian terdahulu terkait penerapan PSAK 101 di koperasi syariah. SLR ini penting sebagai landasan untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi, kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah ditawarkan oleh para peneliti dan praktisi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan akuntansi syariah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan di sektor koperasi syariah.

Lebih jauh, hasil tinjauan literatur ini dapat menjadi referensi penting bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan pelaku koperasi syariah dalam menyusun strategi edukasi, regulasi, dan supervisi yang lebih efektif. Harapannya, koperasi syariah di Indonesia ke depan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga menunjukkan kualitas tata kelola dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menempuh pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses* (PRISMA) 2020. Pemanfaatan PRISMA dipilih karena kerangka pelaporannya menghadirkan proses telaah yang sistematis, transparan, dan replikatif, serta mampu meminimalkan bias seleksi dan pelaporan dalam kajian literatur. Pendekatan ini juga memudahkan peneliti selanjutnya menelusuri jejak keputusan yang dibuat dalam proses penyaringan dan analisis artikel (Hardani, Ustiawaty, 2017).

SLR dinilai paling tepat untuk topik ini karena kajian mengenai implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah masih belum banyak terkompilasi secara sistematis. Literatur di bidang ini tersebar di berbagai jurnal dengan fokus pada akuntansi syariah, manajemen keuangan koperasi, regulasi

akuntansi, hingga tata kelola kelembagaan berbasis syariah. Oleh karena itu, SLR memungkinkan pemetaan menyeluruh terhadap teori, instrumen pelaporan, praktik implementasi, hingga kesenjangan antara regulasi dan realitas praktik pelaporan keuangan di koperasi syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis untuk peneliti, regulator, dan praktisi akuntansi syariah.

Proses SLR ini dilaksanakan melalui lima tahap utama (Hamzah, 2020):

1. Perumusan pertanyaan penelitian. Tiga pertanyaan utama dirumuskan: (P1) Bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK 101? (P2) Komponen laporan apa saja yang paling sering tidak dipenuhi atau tidak diungkapkan oleh koperasi syariah menurut literatur? (P3) Faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik dan standar PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah?
2. Strategi pencarian literatur. Penelusuran literatur dilakukan pada April–Mei 2025 melalui beberapa basis data terindeks nasional dan internasional, antara lain Google Scholar, Garuda, Scopus, DOAJ, dan Dimension. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi frasa seperti: “PSAK 101”, “laporan keuangan syariah”, “koperasi syariah”, “akuntansi syariah”, “financial statement PSAK 101”, “BMT”, dan “compliance with PSAK 101”.
3. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi ditetapkan untuk menjamin kesesuaian fokus studi. Artikel yang dimasukkan harus: a) Terbit dalam rentang tahun 2015–2025; b) Telah melalui proses *peer-review*; c) Ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris; d) Secara eksplisit membahas penerapan PSAK 101 atau pelaporan keuangan syariah pada koperasi/BMT; e) Menyediakan data empiris, studi kasus, atau kerangka analisis pelaporan keuangan. Literatur yang bersifat teoretis tanpa aplikasi langsung, artikel opini, maupun dokumen tanpa akses *full-text* dieliminasi dari seleksi.
4. Seleksi dan ekstraksi data. Seleksi artikel dilakukan secara berlapis melalui tahapan identifikasi awal, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan *full-text*, dan inklusi akhir menggunakan diagram alur PRISMA. Dari 487 dokumen awal yang ditemukan, 38 artikel diseleksi untuk dibaca penuh, dan 10 artikel akhirnya dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Setiap artikel diekstraksi ke dalam matriks data yang memuat informasi bibliografi, lokasi/objek penelitian, metode penelitian, jenis laporan keuangan yang dikaji, serta temuan utama terkait dengan kesesuaian pelaporan terhadap PSAK 101.
5. Analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah *thematic synthesis* untuk mengidentifikasi pola tematik dan kesenjangan pengetahuan. Selain itu, dilakukan *vote counting* sederhana untuk menilai konsistensi temuan antar penelitian, khususnya terkait dengan pelaporan elemen wajib dalam PSAK 101 seperti dana syirkah temporer, laporan zakat dan kebajikan, laporan perubahan investasi terikat, serta catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil sintesis ditemukan tiga tema besar (Yusuf, 2017): a) Tingkat implementasi laporan keuangan sesuai PSAK 101, b) Faktor penghambat implementasi. c) Strategi perbaikan.

Hasil dari review ini kemudian digunakan untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor organisasi, komponen pelaporan PSAK 101, dan output transparansi serta akuntabilitas keuangan koperasi syariah. Kerangka ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lapangan lanjutan, sekaligus sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pelatihan dan audit internal berbasis syariah.

**Tabel 1. Kriteria Inklusi – SLR Implementasi PSAK 101**

No	Kriteria Inklusi	Penjelasan
1	Tahun publikasi 2020–2025	Menangkap tren pasca disahkannya PSAK 101 dan revisi terkait
2	Artikel <i>peer-reviewed</i>	Validitas ilmiah terjamin
3	Bahasa Indonesia atau Inggris	Memudahkan akses dan interpretasi literatur lokal dan global
4	Topik PSAK 101 dan pelaporan keuangan syariah	Fokus pada koperasi/BMT dan implementasi PSAK 101
5	Studi berbasis koperasi syariah atau BMT	Termasuk laporan praktik pelaporan keuangan
6	Mengandung data empiris atau evaluasi praktik akuntansi	Studi kasus, komparasi praktik, audit internal
7	Tersedia <i>full text</i>	Diperlukan untuk ekstraksi mendalam

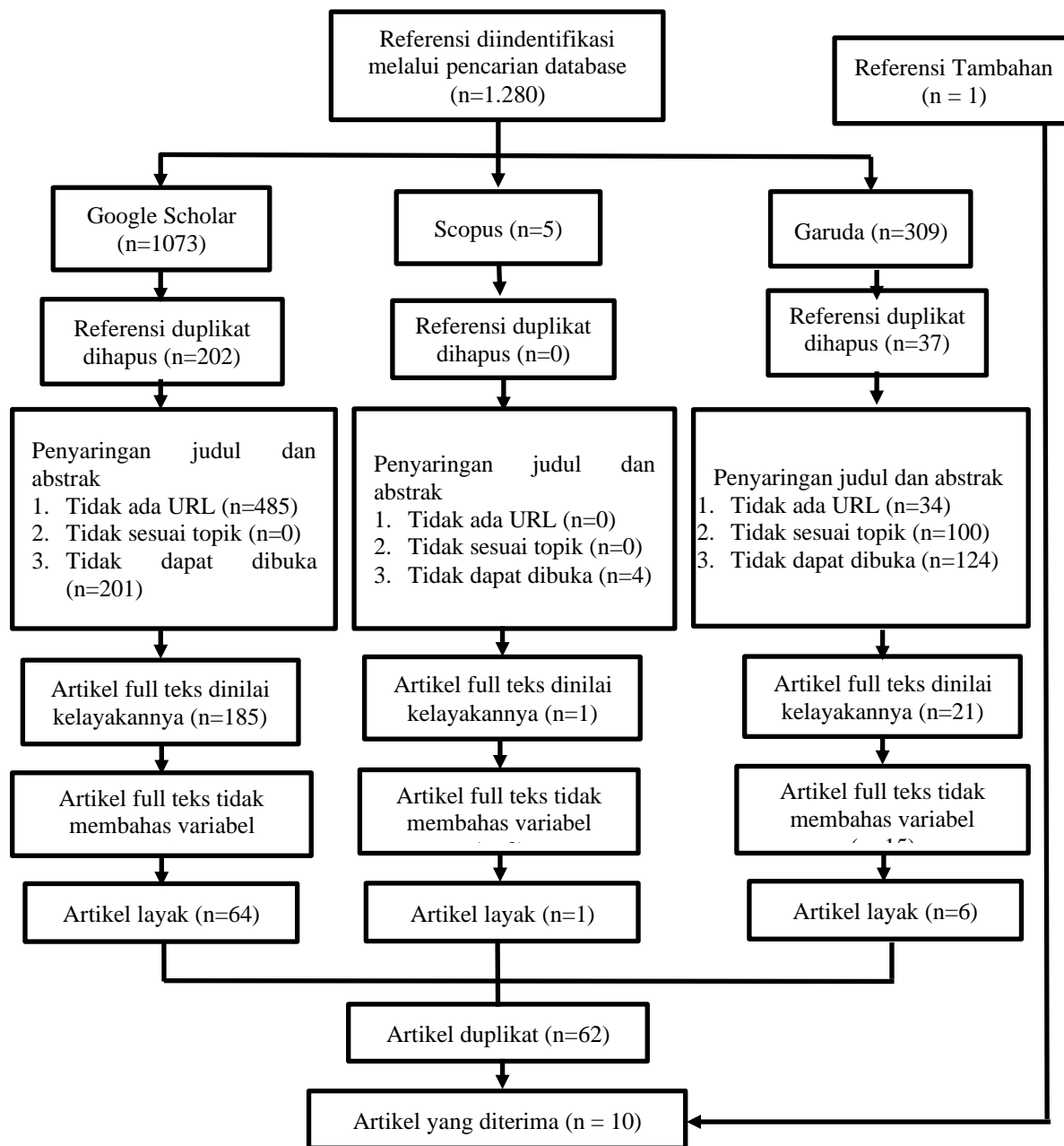
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam kajian literatur ini, peneliti merujuk pada 10 artikel ilmiah yang menjadi sumber utama dalam proses analisis. Seluruh artikel merupakan hasil penelitian empiris yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2015 hingga 2025 guna memastikan keterkinian data serta relevansi terhadap isu implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah. Sebanyak 10 artikel diperoleh melalui perangkat *Publish or Perish* yang terhubung dengan beberapa basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus. Sementara itu, satu artikel tambahan ditemukan melalui pencarian manual dengan bantuan mesin pencari Google di luar platform *Publish or Perish*.

Seluruh artikel yang terpilih dinilai mampu memberikan jawaban terhadap tiga fokus utama dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada ketentuan PSAK 101 (P1); (2) komponen laporan keuangan apa saja yang paling sering tidak disusun atau tidak sesuai dengan standar PSAK 101 (P2); dan (3) faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong dalam penerapan pelaporan keuangan syariah sesuai PSAK 101 (P3). Setiap artikel memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman menyeluruh

terkait sejauh mana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan koperasi syariah telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 101.



**Diagram 1.** Proses Seleksi Artikel

Berdasarkan diagram PRISMA yang telah disusun, peneliti berhasil menyaring 18 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Seluruh literatur yang lolos seleksi ini dianalisis guna menyusun telaah pustaka secara sistematis dan menarik kesimpulan yang relevan terhadap fokus kajian, yaitu implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi syariah.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis tematik, menggunakan matriks analisis sebagai alat bantu utama. Setiap artikel ditelaah berdasarkan beberapa elemen penting, antara lain: nama penulis dan tahun terbit, tujuan penelitian, jenis koperasi syariah atau BMT yang menjadi objek studi,

komponen laporan keuangan yang dianalisis (seperti laporan dana syirkah temporer, dana zakat, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), serta temuan dan simpulan utama terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan PSAK 101.

Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari literatur. Tiga tema sentral yang ditemukan antara lain: (1) Tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap struktur laporan keuangan sesuai PSAK 101; (2) Kendala yang dihadapi koperasi syariah dalam mengimplementasikan standar PSAK 101, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, maupun pengawasan; dan (3) Rekomendasi strategis yang diajukan oleh peneliti terdahulu untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan koperasi syariah. Seluruh hasil ekstraksi dan sintesis ini dirangkum dalam Tabel 2 yang menyajikan ringkasan matriks literatur relevan terkait implementasi PSAK 101 dalam lingkungan koperasi syariah.

**Tabel 2. Ringkasan Referensi Jurnal Terkait Implementasi PSAK 101 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah**

No	Referensi (Penulis & Tahun)	Desain Penelitian / Ukuran Sampel	Sumber Jurnal / Tesis	Lokasi Penelitian
1	(Saputri et al., 2019)	Deskriptif Kualitatif; Observasi Dan Wawancara Dengan Pengurus Koperasi	Jurnal Bisnis Net, Vol. 6 No. 2, Desember 2023	Koperasi Syariah X, Mataram
2	(O. Feriyanto, 2024)	Kualitatif Deskriptif; Wawancara Dan Dokumentasi	Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah	Bandung
3	(Razak & Firmansyah, 2021)	Kualitatif; Content Analysis Atas Laporan Keuangan 4 Bank Syariah	Jurnal Syi'ar Iqtishadi, Vol. 5 No. 2, November 2021	Bank Syariah Di Indonesia
4	(Nazhifah, Wisandani, & Marlina, 2020)	Deskriptif Kualitatif; Observasi, Wawancara, Dokumentasi	Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, Mei 2020	Kspps Bmt Al-Bina, Tasikmalaya
5	(Mulya Subastyan, Fitriyah, & Puspitasari L., 2022)	Kualitatif Deskriptif; Wawancara Dan Dokumentasi	Jurnal Al-Tijarah, Vol. 7 No. 2	Kjks Bmt Al-Uswah, Ciamis
6	(Nazri & Vonna, 2024)	Kualitatif Deskriptif	Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam	Indonesia
7	(Nabilah &	Kualitatif Deskriptif;	Jurnal Ekonomi	Bmt Barokah

	Suprayogi, 2017)	Wawancara Dan Dokumentasi	Syariah Dan Perbankan Islam, Vol. 3 No. 2	Mandiri Sejahtera
8	(Maulidya & Sn, 2023)	Kualitatif Deskriptif	Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Islam	Kjks Bmt Mentari, Bandar Lampung
9	(Ula & Nawirah, 2020)	Kualitatif Deskriptif	EL Muhasaba Jurnal Akuntansi	Indonesia
10	(Wulandari, 2019)	Kualitatif Deskriptif	E-Jurnal Equilibrium Manajemen	Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak

Berdasarkan hasil review sistematis terhadap sepuluh jurnal terpilih sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, dapat diidentifikasi bahwa implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah menjadi isu yang strategis dan mendapat perhatian dari berbagai peneliti. Kajian-kajian tersebut menunjukkan keberagaman dari segi desain penelitian, metode pengumpulan data, hingga lokasi geografis lembaga yang diteliti, mulai dari Mataram, Tasikmalaya, Ciamis, Pontianak, hingga Bandar Lampung.

Sebagian besar studi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus koperasi atau BMT. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengadopsi content analysis terhadap laporan keuangan bank syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan standar PSAK 101. Variasi ini mencerminkan adanya kekayaan metodologis dalam mengkaji realitas penerapan akuntansi syariah di lapangan.

Selanjutnya, untuk memberikan pemetaan yang lebih terstruktur terhadap kontribusi masing-masing literatur dalam menjawab fokus kajian, Tabel 3 menyajikan hasil penelitian yang dikaitkan langsung dengan tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu: (P1) Bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK 101? (P2) Komponen laporan apa saja yang paling sering tidak dipenuhi atau tidak diungkapkan? dan (P3) Faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung dalam implementasi PSAK 101 di koperasi syariah?.

**Tabel 3. Hasil Penelitian Literatur yang Menjawab Pertanyaan Penelitian 1, 2, dan 3**

No.	Penulis & Tahun	Temuan Utama	P1	P2	P3
1	(Saputri et al., 2019)	Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Sesuai Psak 101, Hanya Menyajikan Neraca Dan Laba Rugi	✓	✓	
2	(O. Feriyanto, 2024)	Keterbatasan Pemahaman Sdm Dan Sistem Akuntansi Menjadi Penghambat Penerapan Psak 101 Secara Utuh	✓		✓

3	(Razak & Firmansyah, 2021)	Beberapa Bank Syariah Tidak Mengungkap Laporan Dana Syirkah Temporer Dan Zis Secara Lengkap	✓	✓	
4	(Nazhifah et al., 2020)	Bmt Menyusun Laporan Tanpa Struktur Lengkap Sesuai Psak 101; Hanya 2 Dari 5 Komponen Disajikan	✓	✓	
5	(Mulya Subastyan et al., 2022)	Kelemahan Utama Ada Pada Pelaporan Dana Sosial, Belum Adanya Laporan Perubahan Dana Zis Dan Amanah	✓	✓	
6	(Nazri & Vonna, 2024)	Masih Ditemukan Kekeliruan Penyajian Laporan Dana, Terutama Dalam Klasifikasi Dana Nonhalal	✓	✓	✓
7	(Nabilah & Suprayogi, 2017)	Pelaporan Belum Menyentuh Aspek Transparansi Dana Zis Secara Rinci, Meskipun Sesuai Struktur Dasar Psak	✓	✓	
8	(Maulidya & Sn, 2023)	Kspps Al-Mubarak Hanya Menyusun Neraca Dan Laba Rugi, Tidak Menyertakan Laporan Dana Syirkah Temporer	✓	✓	
9	(Ula & Nawirah, 2020)	Belum Ada Integrasi Sistem Pencatatan Sesuai Psak 101; Sdm Belum Memahami Standar Secara Menyeluruh	✓		✓
10	(Wulandari, 2019)	Rendahnya Kepatuhan Pada Penyajian Komponen Laporan Dana Sosial Dan Amanah	✓	✓	

Tabel 3 merangkum kontribusi masing-masing artikel terhadap tiga fokus utama penelitian, yakni: (P1) bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK 101, (P2) komponen laporan apa saja yang paling sering tidak dipenuhi atau tidak diungkapkan, dan (P3) faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung dalam implementasi PSAK 101.

Secara umum, mayoritas literatur menunjukkan bahwa koperasi syariah dan BMT telah berupaya menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, terutama dalam hal penyajian neraca dan laporan laba rugi (P1). Namun demikian, sebagian besar belum menyusun laporan-laporan tambahan seperti laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, dana syirkah temporer, maupun dana amanah (P2). Ketidaksiesuaian ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman SDM terhadap standar akuntansi syariah, belum terintegrasinya sistem informasi akuntansi, serta kurangnya pendampingan teknis dan pengawasan dari regulator (P3).

Strategi yang disarankan dalam beberapa penelitian mencakup pelatihan berkelanjutan bagi pengelola koperasi, penyusunan pedoman teknis yang aplikatif, serta peningkatan koordinasi antara koperasi syariah dengan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) dan otoritas keuangan. Dengan demikian, walaupun implementasi PSAK 101 menghadapi tantangan struktural dan teknis, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sinergi antara kapasitas internal lembaga dan dukungan sistemik dari pihak eksternal.

## **Pembahasan**

### **Kepatuhan terhadap PSAK 101 dalam Praktik Penyusunan Laporan Keuangan**

Hasil review terhadap sepuluh artikel ilmiah menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah dan BMT telah menunjukkan niat dan upaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi syariah PSAK 101. Hal ini terlihat dari konsistensi penyajian laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi sebagai komponen utama laporan keuangan. Studi oleh (Saputri et al., 2019), (Maulidya & Sn, 2023), serta (Wulandari, 2019) menunjukkan bahwa meskipun masih terbatas pada komponen dasar, lembaga keuangan syariah telah mengimplementasikan sebagian struktur PSAK 101. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan berbasis syariah. Namun, sebagian besar implementasi tersebut belum menyeluruh dan belum mengintegrasikan seluruh aspek pelaporan sebagaimana diatur dalam PSAK 101. Dengan kata lain, praktik implementasi PSAK 101 masih bersifat parsial dan belum mencapai tingkat kepatuhan yang ideal.

### **Ketidaksesuaian Komponen Laporan Keuangan terhadap PSAK 101**

Meskipun neraca dan laporan laba rugi telah menjadi praktik umum, hasil analisis mengungkapkan bahwa komponen-komponen pelaporan lain yang disyaratkan oleh PSAK 101 justru sering diabaikan. Beberapa laporan seperti laporan perubahan dana syirkah temporer, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), serta laporan perubahan dana amanah belum banyak disusun secara sistematis oleh koperasi syariah. Hal ini tampak dalam studi (Nazri & Vonna, 2024), (Mulya Subastyan et al., 2022), dan (Razak & Firmansyah, 2021) yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total komponen PSAK 101 yang benar-benar diterapkan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik operasional lembaga keuangan syariah, yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas informasi keuangan serta kepercayaan publik terhadap transparansi lembaga.

### **Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi PSAK 101 (P3)**

Dalam hal kendala implementasi, sebagian besar literatur sepakat bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan hambatan utama. Penelitian oleh (O. Feriyanto, 2024), (Ula & Nawirah, 2020), dan (Nazri & Vonna, 2024) menunjukkan bahwa masih banyak pengelola koperasi syariah yang belum memahami secara komprehensif prinsip dan isi PSAK 101. Di samping itu, belum adanya integrasi sistem informasi akuntansi syariah yang sesuai standar juga memperparah kondisi ini. Lembaga keuangan syariah kecil seperti BMT seringkali kali

terkendala oleh minimnya dukungan teknologi dan pendampingan regulatif dalam menyusun laporan yang sesuai standar. Kelemahan lainnya adalah tidak adanya pengawasan berkelanjutan dari regulator atau Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memastikan konsistensi penerapan standar. Namun demikian, sebagian artikel juga mencatat adanya faktor pendorong seperti kesadaran pengurus akan pentingnya transparansi (Nabilah & Suprayogi, 2017) serta keinginan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas lembaga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil telaah sistematis terhadap sepuluh literatur ilmiah yang mengkaji implementasi PSAK 101 pada koperasi syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelaporan keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Sebagian besar koperasi syariah atau BMT memang telah menyusun laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi sesuai dengan struktur dasar PSAK 101, namun banyak komponen penting lainnya – seperti laporan dana syirkah temporer, laporan sumber dan penggunaan dana zakat/infaq/shadaqah (ZIS), serta laporan perubahan dana Amanah masih belum sepenuhnya diterapkan.

Ketidaksesuaian ini terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman SDM terhadap standar akuntansi syariah, belum tersedianya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip syariah, serta kurangnya pendampingan teknis dari otoritas terkait. Selain itu, minimnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memperburuk kondisi kepatuhan lembaga terhadap ketentuan PSAK 101.

Meskipun demikian, studi juga menunjukkan bahwa terdapat komitmen dari sebagian pengurus koperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan koperasi syariah ke depan.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara regulator, akademisi, dan praktisi untuk menyusun strategi edukasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi PSAK 101 secara lebih sistematis. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa koperasi syariah tidak hanya berkembang dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi koperasi dalam sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Damayanti, A., Sugianto, & Atika. (2023). Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui, North Sumatra. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 251–258. <https://doi.org/10.37676/jmea.v2i2.186>
- Firayani Firayani, Bambang Kurniawan, & Eri Nofriza. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Sikap Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus UMKM Sektor Kuliner Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir). *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 285–301.

Title: Analisis Implementasi PSAK 101 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah: Studi Fenomenologi pada BMT

<https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.788>

- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Studi Kasus: Single Case, Instrumental Case, Multicase dan Multisite*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Maulidya, A., & Sn, N. Q. (2023). Analysis of the Implementation of PSAK 101 in the Financial Statements of Sharia Financing Savings and Loans Cooperative Al Mubarak Based on Sharia Economic Perspective. *Acopen*, 10(2), 1–18.
- Mulya Subastyan, G., Fitriyah, N., & Puspitasari L., I. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Bmt Al-Iqtishady. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 462–479. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.267>
- Nabilah, N., & Suprayogi, N. (2017). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(10), 843. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp843-855>
- Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 42–58. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1577>
- Nazri, C. K., & Vonna, S. M. (2024). Implementation Analysis of PSAK ( Financial Accounting Standard ) No . 107 at Meulaboh Branch Pawnshop Syariah. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 05(01), 119–133.
- Nurul Aulia Dewi, Alike Hariani, P. P. R. (2023). Analisis Manfaat Media Sosial Sebagai Pengembangan Umkm Di Kabupaten Deli Serdang. *Kabillah (Journal of Social Community)*, 8(14), 129–143.
- O. Feriyanto, Y. N. (2024). BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO , KECIL DAN ( STUDI KASUS PASAR SEGAR KOPO BANDUNG ). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 1806–1817.
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101? *Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>
- Saputri, L., Fitriyah, N., & Jumaidi, L. T. (2019). KONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI & UKM PADA KOPERASI SYARIAH X. *Jurnal Bisnis Net*, 6(2), 706–716.
- Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>
- Ula, N., & Nawirah, N. (2020). Implementasi Sak Syariah Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (Kprs). *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123–132. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.8045>
- Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1–17. Retrieved from <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/82>
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:

**Author:** *Widya Susanty, Shabri Abd Majid, Sugianto*

Kencana.